

Jokowi Pimpin Upacara 17 Agustus di IKN dan Ma'ruf Amin di Jakarta

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memimpin upacara 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN). Sedangkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bakal memimpin upacara di Istana Jakarta.

"Pak Wapres yang di sini, IKN Insya Allah dipimpin Pak Presiden langsung," kata Menko PMK Muhadjir Effendy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/6).

Presiden Jokowi, kata Muhadjir, akan ditemani oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka akan menemani Wapres Ma'ruf di Istana Jakarta.

"Nanti Pak Wapres terpilih dampingi Wapres, Presiden terpilih akan dampingi Presiden," kata Muhadjir.

Muhadjir menyebut bahwa kirab bendera dan akan dilaksanakan di IKN dan di Jakarta. Termasuk hiburan bagi masyarakat yang akan tersambung secara hibrid baik di IKN maupun di Jakarta.

"Di sini (Jakarta) hiburan, di sana (IKN) hiburan. Hybrid," kata Muhadjir.

Sejumlah tokoh kemungkinan akan ikut dalam upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Selain Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, sejumlah Duta Besar pun kemungkinan akan hadir. Namun opsinya, para duta besar itu tidak akan menginap.

"Ada kemungkinan Dubes juga di IKN nanti tidak nginap langsung acara terus balik," katanya. Sejauh ini memang belum ada daftar (list) yang akan berangkat ke IKN untuk mengikuti upacara 17 Agustus. Begitu pun mengenai kepastian mantan-mantan presiden akan mengikuti upacara di IKN atau di Istana Jakarta.

Namun kemungkinan kahadiran para pejabat itu akan dipecah di dua tempat, yaitu mengikuti upacara di IKN maupun di Istana Kepresidenan Jakarta. ● han

Saksi Sebut SYL Pernah Tolak Uang Sekardus saat Menjabat Wagub Sulsel

JAKARTA (IM) - Salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Malik Faisal, menyatakan Syahrul Yasin Limpo (SYL) pernah menolak uang sekardus saat masih menjabat Wakil Gubernur Sulsel.

Abdul Malik mengungkapkan hal ini saat menjadi saksi a de charge atau meringkas bagi SYL dalam sidang dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Malik menyebutkan, SYL pernah disodorkan uang dalam kardus oleh orang tidak dikenal saat masih menjadi Wakil Gubernur Sulsel.

Ia menjelaskan, kala itu ada seorang tamu yang mengatakan ingin bertemu dengan eks Menteri Pertanian itu dengan membawa kardus. Saat itu ia mengetahui hal tersebut karena dirinya juga akan menemui SYL.

"Terus dia (SYL) tanya 'apa itu dia bawa kenapa ada bungkusannya', saya bilang 'saya tidak tahu karena saya tidak periksa'. Dia bilang 'oke suruh masuk'," kata Malik di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/6/2024).

Setelah menghadap SYL, orang tersebut keluar dengan tidak lagi membawa kardus

yang ia bawa masuk. Tak lama berselang, Malik ditelepon SYL untuk mengembalikan kardus tersebut.

"Saya bawalah itu barang karena sudah terbuka, saya lihat ada uang saya lihat didalam dus itu, ya kira-kira dusnya itu sebesar dus aqua," ujarnya.

Ia pun mengembalikan kardus tersebut ke yang bersangkutan dan menyampaikan SYL tidak berkenan menerima uang tersebut. Malik pun sempat bertanya ke SYL mengapa tidak menerima uang tersebut.

"Dia bilang 'eh malik jangan harga dirimu hilang gara-gara uang jangan kau terhina gara-gara uang'. Makanya saya menganggap beliau sangat punya integritas dan saya bersumpah demi Allah itu yang terjadi," paparnya.

Sekadar informasi, SYL saat ini menjadi terdakwa bersama dua anak buahnya, yakni Sekjen Kementan, Kasdi Subagyo dan Direktur Alat dan Mesin Kementan, Muhammad Hatta.

Dalam surat dakwaan, diduga SYL menerima gratifikasi senilai Rp44,5 miliar. Jumlah tersebut didapatkan dari 'patungan' pejabat eselon I dan 20 persen dari anggaran di masing-masing Sekretariat, Direktorat, dan Badan pada Kementan. ● han

Pemilik Akun Icha Shakila yang Diduga Dalang Kasus Ibu Cabuli Anak Kandung

JAKARTA (IM) - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkap, pihaknya memeriksa pemilik akun Facebook Icha Shakila, Senin (10/6).

Pemilik akun Facebook Icha Shakila itu diduga kuat menjadi dalang penyebaran video asusila yang dilakukan ibu berinisial R (22) terhadap anak kandungnya yang berusia 2 tahun.

Ade mengatakan, pemeriksaan akan berlangsung di rumah terduga pelaku, karena pemilik akun Facebook baru saja melahirkan, dan masih menjalani masa pemulihan.

"Pemeriksaan jam 11.00 di Kediaman yang bersangkutan. Dikarenakan yang bersangkutan masih belum bisa keluar rumah karena baru saja melahirkan," kata Ade kepada wartawan, Senin (10/6).

Sebagai informasi, pemilik akun Icha Shakila saat ini menjadi target operasi pihak kepolisian. Karena dia mengimpor-impingi R pekerjaan, namun harus menuruti kemauannya untuk mengirimkan foto tanpa busana.

Bahkan, pemilik

akun Icha Shakila juga mengimpor-impingi akan mengirimkan sejumlah uang kepada R. Karena terimpit kondisi ekonomi, tersangka R pun menuruti perintah akun Icha Shakila.

"Karena desakan kebutuhan ekonomi, tersangka R mengirimkan foto tanpa busana milik R (22) terhadap anak kandungnya," kata Ade, Senin (3/6).

Tidak hanya itu, pada 30 Juli 2023 setelah mengirimkan foto tersebut, R diminta untuk membuat video dengan skenario dari pemilik akun Facebook Icha Shakila. Dan mengancam menyebarkan foto tanpa busana milik R, jika tidak menuruti perintah pemilik akun Icha Shakila.

Kemudian pada hari yang sama 30 Juli 2023 tersangka mengikuti perintah dari akun Facebook Icha Shakila membuat video yang bermuatan pornografi antara tersangka dengan anak kandungnya.

"Tersangka juga dijanjikan akan dikirim uang sejumlah Rp15 juta," ucap Ade. ● meci

2 | Polhukum

FOTO: ANTARA



PEMERIKSAAN HASTO KRISTIYANTO DI KPK

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kedua kanan) didampingi tim pengacaranya berjanja menuju ruangan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/6). Hasto memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku.

Komnas HAM Sebut Polri Paling Banyak Diadukan Soal Pelanggaran HAM

Dari ribuan aduan yang diterima Komnas HAM, sebanyak 625 aduan masuk dalam tahap pemantauan, 248 mediasi, dan 1.423 saran upaya lainnya.

JAKARTA (IM) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan, Polri merupakan institusi yang paling banyak diadukan dalam kasus pelanggaran HAM. Komnas HAM mencatat, ada 771 pengaduan terkait pelanggaran HAM yang diarahkan kepada Polri pada sepanjang 2023.

"Top three pihak teradu Polri (771), korporasi (412 kasus), Pemerintah Daerah (301 kasus)," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigi, saat Komnas HAM merilis Laporan Tahunan Komnas HAM 2023 di Kantor Komnas HAM, Jalan Lathuhari

Nomor 4B, Jakarta Pusat, Senin (10/6).

Adapun jumlah aduan yang diterima Komnas HAM sepanjang 2023 mencapai 2.753 aduan, terdiri dari 2.422 aduan yang diterima kantor pusat Komnas HAM, sedangkan 331 aduan lainnya diterima oleh 6 kantor perwakilan Komnas HAM di daerah.

Atnike menyebutkan, dari laporan itu, tiga wilayah yang paling banyak terdapat aduan terkait HAM yaitu Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utara.

"Top three hak dilanggar adalah hak atas kesejahteraan

(1.065 aduan), hak memperoleh keadilan (896 aduan, dan hak atas rasa aman (258 aduan)," ujar Atnike.

Dari ribuan aduan yang diterima Komnas HAM, 625 aduan masuk dalam tahap pemantauan, 248 mediasi, 1.423 saran upaya lainnya. Berdasarkan hasil pemantauan, 20 di antaranya diterbitkan amicus curiae, 77 aduan lainnya diterbitkan rekomendasi akhir. Sedangkan untuk mediasi, 9 di antaranya mencapai kesepakatan damai, 52 berita acara mediasi.

Atnike menyebut, permasalahan HAM di Papua menjadi isu prioritas yang harus diperhatikan karena kerawannya terhadap konflik.

"Secara khusus kita masih perlu memberikan perhatian terhadap situasi HAM di Papua dengan kerentanannya terhadap konflik dan kekerasan maupun kerentanan-

nya terhadap masalah sosial ekonomi dan lingkungan," ujarnya.

Selain isu Papua, Atnike menyebutkan ada 8 isu lain yang menjadi prioritas Komnas HAM pada 2023, yakni pelanggaran HAM Berat, konflik agraria, kelompok marginal (disabilitas, pekerja migran, masyarakat adat, dan pekerja rumah tangga).

Kemudian, isu terkait perlindungan pembela HAM, kebebasan beragama dan berkeyakinan, bisnis dan HAM, antisipasi Pemilu 2024 dan pemantauan rencana nasional HAM 2022-2024.

Selain itu, Atnike juga turut memaparkan capaian Komnas HAM secara kelem-

bagaan, misalnya, Komnas HAM mendapatkan akreditasi A dari Global Alliance of National Human Rights Institutions. Kemudian, Komnas HAM mendapatkan akreditasi B terkait akuntabilitas kinerja dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Lalu, Komnas HAM mendapat nilai kinerja anggaran sangat baik dari Kementerian Keuangan, kearsipan sangat baik dari Arsip Nasional Republik Indonesia, serta sistem merit yang baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara. ● lus

Nurul Ghuftron Laporkan Dewas KPK ke Bareskrim, Ini Tanggapan Polri

JAKARTA (IM) - Polri akhirnya buka suara terkait laporan yang dibuat Wakil Ketua KPK, Nurul Ghuftron, terhadap anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Polri mengatakan pada dasarnya Polri akan menerima setiap laporan masyarakat.

"Terkait dalam hal ini kewajiban penyidik nanti akan memberikan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) kepada pelapor ya," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu di Jakarta Selatan, Senin (10/6).

"Jadi terkait dalam hal ini, yang sudah dilaporkan. Kalau ada, nanti akan diberikan surat pemberitahuan hasil daripada proses penyelidikan di awal," ujarnya.

Ditanya mengenai detail terlapor dan duduk perkara kasus tersebut, Trunoyudo belum menjelaskan. Namun, dia menegaskan pada dasarnya setiap laporan masyarakat pasti akan diterima Polri untuk diteliti.

"Setiap laporan yang kita terima pasti kita terima. Kemudian nantinya perkembangannya SP2HP kita akan kirim ke pelapor," ujarnya.

Nurul Ghuftron melaporkan beberapa anggota Dewas KPK ke Bareskrim Polri. Ghuftron melaporkan beberapa anggota Dewas KPK itu terkait dugaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dan penyalahgunaan wewenang.

"Saya melaporkan dugaan tindak pidana ke Ba-

reskrim itu dengan dua pasal. Pasal 421 (KUHP), apa 421? Adalah perbuatan penyelenggara negara memaksa untuk berbuat atau tidak berbuat. Lanjutnya bisa dibaca di KUHP," kata Ghuftron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (20/5).

"Yang kedua Pasal 310 (KUHP), yaitu pencemaran nama baik, apa dasar-dasarnya, Pak? Nantilah kita, kan ini masih berproses," ujarnya.

Ghuftron menyebutkan sudah ada beberapa saksi yang dipanggil untuk diperiksa. Dia melaporkan anggota Dewas KPK lebih dari satu orang.

"Ada beberapa, tidak satu (anggota Dewas KPK yang dilaporkan)," ungkapnya. ● han



RDP KEMENDAGRI, DKPP, OTORITAS IKN DENGAN KOMISI II DPR

Mendagri Tito Karnavian mengikuti rapat dengan pendapat dengan komisi II DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/6). RDP terkait pendahuluan pembahasan RAPBN tahun 2025, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023.

KPU: Realisasi Anggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 Rp1,7 T

JAKARTA (IM) - Ketua KPU Hasyim Asy'ari memaparkan realisasi anggaran tahun 2024 tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 mencapai Rp 1,7 triliun.

Hal itu disampaikan Hasyim dalam rapat pembahasan RAPBN TA 2025 KPU bersama Komisi II DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/6). Hasyim mengatakan realisasi anggaran pemungutan dan penghitungan suara sebesar 79,64%.

"Pemungutan dan penghitungan suara, pagu Rp 2.190.227.904.000, realisasi Rp 1.744.345.658.081, sisa Rp 445.880.600.919. Realisasi 79,64%," ujar Hasyim.

Hasyim merincikan pada tiga tahapan, yakni penyiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pemungutan dan penghitungan suara. Dia mengatakan anggaran penyiapan pemungutan dan penghitungan suara direalisasikan sebesar Rp 27 miliar.

"Penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, pagu Rp 37.583.188.000, realisasi Rp 27.359.831.590, sisa Rp 10.223.356.410," kata Hasyim.

Selanjutnya, Hasyim memaparkan anggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara direalisasikan sebesar Rp 1 triliun. Sementara, anggaran evaluasi pemungutan dan penghitungan suara sebesar Rp 3 miliar.

"Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, pagu Rp 2.136.236.442.000, realisasi Rp 1.713.930.784.916, sisa Rp 422.305.657.084," katanya.

"Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, pagu Rp 16.408.274.000, realisasi Rp 3.055.041.575, sisa Rp 13.351.587.425," katanya menambahkan. ● meci

PENGUMUMAN

Memenuhi ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbuka, dengan ini dikemukakan kepada pihak manapun yang berkepentingan bahwa seluruh pemegang saham PT FAGTO SOLUTION INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), akan melaksanakan penjualan atas seluruh sahamnya.

Bagi pihak manapun yang memiliki tagihan terhadap Perseroan atau keberatan terhadap penjualan seluruh saham tersebut, mohon segera dapat menyampaikannya secara tertulis disertai dengan bukti-bukti yang sah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, ke alamat:

Jl. Mampang Prapatan Raya No. 73A Lt. 3, Kel. Tegol Parang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Terima kasih atas perhatiannya.
Direksi
PT FAGTO SOLUTION INDONESIA



KASUS ADUAN PELANGGARAN HAM TURUN PADA 2023

Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Tharyat (kedua kiri) menerima Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2023 yang diserahkan oleh Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigi (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua Bidang Eksternal Abdul Haris Semendawai (kanan) dan Wakil Ketua Bidang Internal Pramono Ubaid Tanthowi (kiri) di Jakarta, Senin (10/6). Komnas HAM mencatat 2.753 aduan diterima dari masyarakat pada 2023, dengan demikian jumlah aduan tercatat turun apabila dibandingkan dari tahun 2022 yang mencapai 3.190 aduan.